**BUPATI BENER MERIAH**

**بوفاتي بنرمريه**

**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH**

**NOMOR : 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

**BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM**
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BENER MERIAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah beserta perubahannya dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 perlu diatur biaya umum Pemerintah Kampung Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengalolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42 seri A);

20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kapung (Lembaran Daerah Kabupate Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kampung sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. Perangkat Kampung adalah satuan kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kampung dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah sebagai Pengguna Anggaran/Barang;
6. Biaya dalam jumlah pengeluaran yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun akan terjadi;
7. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan;
8. Standar adalah suatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga);
9. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan;
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
11. Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disebut SSHD adalah harga satuan yang berlaku dan dipakai sebagai standar tidak dapat melebihi;
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah satuan dalam bentuk kegiatan dan tidak dapat dirubah dari yang ditetapkan untuk setiap kegiatan;

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

(1) Standar biaya umum tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kampung tahun anggaran 2017 yang berbasis kinerja;

(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum Tahun Anggaran 2017 juga berfungsi sebagai :
   a. Batas tertinggi; atau
   b. Estimasi

(3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 3

(1) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari HSPK;

(2) HSPK merupakan harga satuan dalam bentuk kegiatan dan tidak dapat melebihi dari yang ditetapkan untuk setiap kegiatan terdiri dari;

   a. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

   b. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/*Focus Group Discution*/Pelatihan/ Kegiatan sejenis;

   c. Honorarium Kelompok Pengajar/Fasilitator/Instruktur/ Narasumber/Penceramah/Pemateri/Peserta pada Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Seminar/Workshop/Diskusi dan sejenisnya;

   d. Uang Saku peserta lokakarya/seminar/pelatihan/bimtek/fokus group discuccion (FGD) atau sebutan lainnya;

   e. Uang Transportasi lokakarya/seminar/pelatihan/bimtek/fokus group discuccion (FGD) atau sebutan lainnya;

   f. Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Pelatihan atau sebutan lainnya;

   g. Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 4

Uraian, satuan dan biaya yang terdapat pada standar biaya umum dalam lampiran I Peraturan ini, standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

**Plt. BUPATI BENER MERIAH,**

**Drs. HASANUDDIN DARJO, MM**

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BENER MERIAH**

**Drs. ISMARISSISKA, MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 45

Lampiran : Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 45
Tanggal : 19 desember 2016

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA ANGGARAN TAHUN 2017 (Rp) | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA** | | | |
| | 1.1 **Honorarium TPK Kegiatan Fisik** | | | |
| | - **Nilai Pagu s.d 150 juta** | | | |
| | Penanggung Jawab | Orang/Kegiatan | 750.000 | |
| | Ketua | Orang/Kegiatan | 600.000 | |
| | Sekretaris | Orang/Kegiatan | 500.000 | |
| | Anggota | Orang/Kegiatan | 400.000 | |
| | - **Nilai Pagu 150 juta s.d 500 juta** | | | |
| | Penanggung Jawab | Orang/Kegiatan | 1.100.000 | |
| | Ketua | Orang/Kegiatan | 850.000 | |
| | Sekretaris | Orang/Kegiatan | 700.000 | |
| | Anggota | Orang/Kegiatan | 500.000 | |
| | - **Nilai Pagu diatas 500 juta** | | | |
| | Penanggung Jawab | Orang/Kegiatan | 1.500.000 | |
| | Ketua | Orang/Kegiatan | 1.000.000 | |
| | Sekretaris | Orang/Kegiatan | 800.000 | |
| | Anggota | Orang/Kegiatan | 600.000 | |
| | 1.2 **Honorarium TPK Kegiatan Non Fisik** | | | |
| | Pelatihan/Fasilitasi/seminar/raker/sosialisasi/ Focus Group Discussion/kegiatan sejenis | Orang/Kegiatan | 500.000 | |
| | 1.3 **Biaya Tenaga Ahli (Penyusunan RAB/Gambar)** | | | |
| | Nilai Pagu s.d 250 juta | Kegiatan | 2% | |
| | Nilai Pagu 250 juta s.d 500 juta | Kegiatan | 2% | |
| | Nilai Pagu diatas 500 Juta | Kegiatan | 2% | |
| | 1.4 **Jasa Pengawasan** | | | |
| | Biaya Pengawasan/Konsultan Pengawas | Kegiatan | 1% | |
| | 1.5 **Verifikasi** | | | |
| | Insentif Verifikasi | Orang/Tahun | 1.200.000 | |
| 2 | **HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SEMINAR/RAKER/SOSIALISASI/FOKUS GRUP DISCUSSION/PELATIHAN/KEGIATAN SEJENIS** | | | |
| | 3.1 Penananggung jawab | Orang/hari | 250.000 | |
| | 3.2 Ketua / Wakil ketua | Orang/hari | 150.000 | |
| | 3.4 Anggota | Orang/hari | 100.000 | |
| 3 | **Kelompok Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber/Penceramah/Pemateri/Peserta pada Kegiatan Pendidikan/Pelatihan/Seminar,Orentasi/Workshop/Diskusi dan Sejenisnya** | | | |
| | 4.1 Bupati/Wakil Bupati | Orang/Jam | 750.000 | |
| | Pengajar /Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah ,Pemateri Eselon II | Orang/Jam | 500.000 | |
| | Pengajar /Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah ,Pemateri Eselon III | Orang/Jam | 350.000 | |
| | Pengajar /Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah ,Pemateri Eselon IV/Non PNS | Orang/Jam | 250.000 | |
| | 4.2 Pakar/ahli/profesional khusus yang mempunyai skill Khusus (profesional) dalam bidang tertentu yang diundang khusus dari: | | | |
| | a. Dalam Daerah | Pertatap Muka | 3.000.000 | |
| | b. Luar Daerah | Pertatap Muka | 5.000.000 | |
| | 4.3 Pengisi Acara Lainnya | | | |
| | - Moderator | Orang/Jam | 150.000 | |
| | - Pembawa acara/Mc | Pertatap Muka | 200.000 | |
| | - Notulis | Pertatap Muka | 200.000 | |
| | - Pembaca Al-Qur'an | Pertatap Muka | 100.000 | |
| | - Pembaca Doa | Pertatap Muka | 100.000 | |
| | - Pemimpin Lagu | Pertatap Muka | 100.000 | |
| 4 | **Uang saku peserta lokakarya/seminar/pelatihan/ bimtek/ Focus Group Discussion (FGD) atau sebutan lainnya** | orang/Hari | 100.000 | |
| 5 | **Uang Transportasi lokakarya/seminar/pelatihan/ bimtek/ Focus Group Discussion (FGD) atau sebutan lainnya** | orang/Hari | 100.000 | Pelaksanaan diluar kampung |
| 6 | **Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan** | | | |
| | 6.1 Nasi Kotak /Prasmanan untuk VIP | op | 50.000 | |
| | 6.2 Nasi Kotak | ok | 25.000 | |
| | 6.3 Nasi Bungkus | op | 15.000 | |
| | 6.4 Snack VIP | op | 10.000 | |
| | 6.4 Snack | ok | 5.000 | |

**7 Satuan Biaya Perjalanan Dinas**

| No | KLARIFIKASI PERJALANAN DINAS | Reje, Ketua Petue, Imem Kampung | Banta Kampung | Aparatur Kampung Lainnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | **Dalam Wilayah Provinsi Aceh** | | | | |
| | a. Penginapan | at cost | at cost | at cost | Sesuai dengan Bill Hotel |
| | b. Uang Harian | | | | |
| | 1. Uang Makan dan Minum | 195.000 | 150.000 | 120.000 | |
| | 2. Uang Transportasi Lokal | 200.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | 3. Uang Saku | 300.000 | 250.000 | 125.000 | |
| | c. Biaya Transport | at cost | at cost | at cost | Sesuai dengan tiket |
| **2** | **Luar Wilayah Provinsi Aceh (dalam wilayah sumatera)** | | | | |
| | a. Penginapan | at cost | at cost | at cost | Sesuai dengan Bill Hotel |
| | b. Uang Harian | | | | |
| | 1. Uang Makan dan Minum | 195.000 | 180.000 | 120.000 | |
| | 2. Uang Transportasi Lokal | 200.000 | 180.000 | 140.000 | |
| | 3. Uang Saku | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
| | c. Biaya Transport | at cost | at cost | at cost | Sesuai dengan tiket |
| | d. Biaya Transport ke Bandara, Pelabuhan, Terminal, dan Stasiun | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| **3** | **Luar Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera** | | | | |
| | a. Penginapan | at cost | at cost | at cost | Sesuai dengan Bill Hotel |
| | b. Uang Harian | | | | |
| | 1. Uang Makan dan Minum | 195.000 | 180.000 | 140.000 | |
| | 2. Uang Transportasi Lokal | 225.000 | 200.000 | 140.000 | |
| | 3. Uang Saku | 250.000 | 230.000 | 175.000 | |
| | c. Biaya Transport | at cost | at cost | at cost | Sesuai dengan tiket |
| | d. Biaya Transport ke Bandara, Pelabuhan, Terminal, dan Stasiun | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| **6** | **dari Kecamatan Syiah Utama/Mesidah/ Permata/Pintu Rime Gayo ke Ibukota Kabupaten** | | | | |
| | a. Penginapan | at cost | at cost | at cost | Sesuai dengan Bill Hotel |
| | b. Uang Harian | | | | |
| | 1. Uang Makan dan Minum | 70.000 | 65.000 | 60.000 | |
| | 2. Uang Transportasi Lokal | 70.000 | 65.000 | 60.000 | |
| | 3. Uang Saku | 70.000 | 65.000 | 60.000 | |
| **7** | **dari Kecamatan Gajah Putih/Timang Gajah/ Bener Kelipah/Bandar ke Ibukota Kabupaten** | | | | |
| | a. Uang Harian | | | | |
| | 1. Uang Makan dan Minum | 55.000 | 50.000 | 45.000 | |
| | 2. Uang Transportasi Lokal | 55.000 | 50.000 | 45.000 | |
| | 3. Uang Saku | 55.000 | 50.000 | 45.000 | |
| **8** | **dari Kecamatan Wih Pesam/Bukit ke Ibukota Kabupaten** | | | | |
| | a. Uang Harian | | | | |
| | 1. Uang Makan dan Minum | 50.000 | 45.000 | 40.000 | |
| | 2. Uang Transportasi Lokal | 50.000 | 45.000 | 40.000 | |
| | 3. Uang Saku | 50.000 | 45.000 | 40.000 | |

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

**Plt. BUPATI BENER MERIAH,**

**Drs. HASANUDDIN DARJO, MM**